



Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Barang Persediaan Pada Polresta Samarinda

Chaerul Anwar¹Irwansyah²

Chaerul Anwar (FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS)

Irwansyah (FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS)

Email: chaerulanwar2013@gmail.com

How to cite: ...

Article History

Received: 01-08-2023

Accepted: 29-09-2023

DOI:

Copyright@year

owned by Author(s).

Published by JIAM.

ABSTRAK

Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan barang persediaan pada Polresta Samarinda telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kesesuaian pelaksanaan pengelolaan barang persediaan menunjukkan telah terlaksananya pengendalian internal yang baik di Polresta Samarinda, khususnya berkaitan dengan 1) penerimaan barang persediaan; 2) penyimpanan barang persediaan di gudang; 3) pendistribusian dan kebutuhan unit kerja; 4) Penatausahaan dan pencatatan; dan 5) penghapusan. Pelaksanaan pengelolaan dan administrasi barang persediaan di Polresta Samarinda Pengelolaan juga telah sesuai dengan beberapa aturan terkait mengenai Barang Milik Negara (BMN), seperti halnya PSAP No. 5 tentang Persediaan, dan PMK 109/PMK.06/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan Dalam Rangka Penertiban Barang Milik Negara.

Kata kunci: pengelolaan, persediaan, pengendalian internal.

ABSTRACT

The results of the study show that the implementation of the internal control system for inventory management at the Polresta Samarinda has been going well and in accordance with the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 17 of 2015 concerning Management of Supplies in the Environment of the Indonesian National Police. The suitability of the implementation of inventory management shows that good internal control has been implemented at the Samarinda Police, especially with regard to 1) receipt of inventory items; 2) inventory storage in warehouses; 3) distribution and needs of work units; 4) Administration and record keeping; and 5) deletion. The implementation of the management and administration of inventory items at the Samarinda Polresta Management is also in accordance with several related regulations regarding State Property (BMN), such as PSAP No. 5 concerning

Inventory, and PMK 109/PMK.06/2019 concerning Guidelines for Implementing Inventory, Assessment and Reporting in the Context of Controlling State Property.

Key words: *management, inventory, internal control.*

A. PENDAHULUAN

Reformasi di bidang keuangan negara telah memberikan perubahan dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan negara yang dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu bentuk reformasi keuangan negara adalah dengan diberlakukannya yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004), dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat (1) menyatakan bahwa keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan (A'yun, 2019).

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan barang persediaan pada Polresta Samarinda. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi khususnya bagi Polresta Samarinda

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pengendalian internal (*internal control*) adalah rencana organisasi dan metoda yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, memperbaiki efisiensi dan untuk mendorong ditaatinya kebijakan manajemen (Krismiaji, 2010). Pengendalian internal biasanya akan mutlak diperlukan seiring dengan tumbuhnya dan berkembangnya suatu organisasi.

Sistem pengendalian internal menurut IAPI (2011) sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian dalam keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pengertian sistem pengendalian internal menurut para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dibuat untuk memberikan jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada di dalam perusahaan

C. METODE

Pengumpulan data dilakukan dengan meninjau secara langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembelian persediaan barang pada Polresta Samarinda terlebih dahulu dilakukan perencanaan kebutuhan anggaran, yaitu alokasi kebutuhan rencana distribusi barang persediaan dan kebutuhan skala prioritas. Tahap selanjutnya dilakukan pengadaan persediaan barang atau perlengkapan. Polresta Samarinda berkaitan dengan pengadaan barang persediaan melakukan kontrak kerja dengan pihak swasta. Selanjutnya pada proses transaksi dilakukan pada saat barang diterima dan untuk menandakan bahwa persediaan barang sudah diterima dan diakui dengan dokumen faktur dan kwitansi/bukti pembayaran sebagai dasar pengukuran yang andal. Pengukuran andal yang dimaksud adalah diketahuinya kuantitas dan harga satuan barang persediaan. Untuk biaya perolehannya hanya disajikan sebesar biaya pembelian, karena tidak terdapat biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya sebab barang persediaan tersebut diambil atau dijemput langsung oleh personil Polresta yang ditugaskan.

Teknis pengelolaan dalam penyimpanan dan pendistribusian yang menjadi tanggungjawab pengelola barang persediaan telah dilaksanakan dengan terwujudnya tertib administrasi khususnya berbagai dokumen yang diperlukan untuk bisa mengeluarkan barang persediaan dan mendistribusikannya sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan jumlah barang yang dikeluarkan akan dilakukan pencatatan mutasi barang yang dilakukan oleh operator persediaan setelah barang didistribusikan oleh penanggungjawab.

Sebagaimana dijelaskan dalam Perkap 17/2015, ketatnya kebutuhan dokumen yang diperlukan baik pada saat penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penatausahaan, dan penhapusan dilaksanakan untuk memenuhi prinsip pengelolaan barang persediaan

E. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan pengelolaan barang persediaan di Polresta Samarinda, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal terhadap pengelolaan barang persediaan pada Polresta Samarinda telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kesesuaian pelaksanaan pengelolaan barang persediaan menunjukkan telah terlaksananya pengendalian internal yang baik di Polresta Samarinda, khususnya berkaitan dengan 1) penerimaan barang persediaan; 2) penyimpanan barang persediaan di gudang; 3) pendistribusian dan kebutuhan unit kerja; 4) Penatausahaan dan pencatatan; dan 5) penghapusan).

F. DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, A. D. Q. (2019). *Perlakuan Akuntansi Persediaan Sesuai Dengan Akuntansi Persediaan Pada Dinas Kota Batu*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/15461>
- Alfons, W. M. A. (2016). Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset di Dinas Perhubungan Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Volume 16 No.4
- IAPI. 2011. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2004. *Pernyataan Standar Akuntan Publik Nomor 5 Tahun 2004 tentang Persediaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Krismiaji, 2010. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP. AMP YKPN.
- Mulyadi. 2017. *Sistem Akuntansi*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat
- Romney, B. M., dan Steinbart J. P. 2014. *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Ketigabelas. Jakarta: Salemba Empat
- Scott, Jason. 2014. *Sistem Pengendalian Intern*. Edisi keenam. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu YKPN.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Administrasi Pertanggung Jawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Persediaan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 109/PMK.06/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan Dalam Rangka Penertiban Barang Milik Negara